



**P E M E R I N T A H   K O T A   T A N G E R A N G**  
**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**DAERAH (RLPPD) KOTA TANGERANG**  
**TAHUN 2019**

---

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1). Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2019, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan datang.

**1.    CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Sebagai gambaran perkembangan indikator kinerja makro tahun 2018-2019 sebagai berikut :

**Tabel 1. Perkembangan Indikator Kinerja Makro Kota Tangerang Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	77,92 poin	78,43 poin	Meningkat 0,51 poin
2.	Angka Kemiskinan	4,76 persen	4,43 persen	Menurun 0,33 poin
3.	Angka Pengangguran	7,4 persen	7,13 persen	Menurun 0,27 poin
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,92 persen	4,31 persen	Melambat 1,61 persen
5.	Pendapatan Per Kapita	74,775 juta rupiah	78,585 juta rupiah	Meningkat 3,81 juta rupiah
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,34 poin	0,32 poin	Menurun 0,02 poin

*Sumber : BPS Kota Tangerang, 2020*

**a. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2017 - 2019**

Komponen IPM Kota Tangerang	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,38	71,42	71,57
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,44	13,83	13,84
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,29	10,51	10,65
Pengeluaran (Ribu Rupiah)	14.104	14.443	14.860
Indeks Harapan Hidup	79,05	79,15	79,34
Indeks Pengetahuan	71,63	73,45	74,45
Indeks Pengeluaran	80,64	81,37	82,24
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>77,01</b>	<b>77,92</b>	<b>78,43</b>

*Sumber: BPS Kota Tangerang (data diolah)*

Sementara angka IPM Kota Tangerang dibandingkan dengan angka IPM nasional dan Provinsi Banten dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3. IPM Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional  
Tahun 2015-2019**

Tahun	Nilai IPM		
	Kota Tangerang	Banten	Nasional
2015	76,08	70,27	69,55
2016	76,81	70,96	70,18
2017	77,02	71,42	70,81
2018	77,92	71,95	71,37
<b>2019</b>	<b>78,43</b>	<b>72,44</b>	<b>71,92</b>

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2019

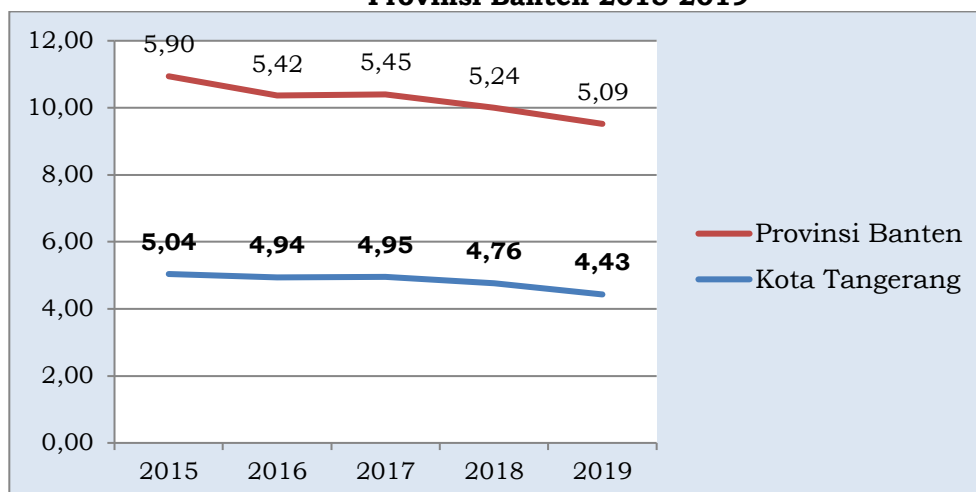
Perkembangan pembangunan manusia di Kota Tangerang secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2019, IPM Kota Tangerang telah mencapai 78,43, atau meningkat 0,51 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 77,92.

Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini, menjadi pertanda bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Tangerang yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin membaik.

#### **b. Angka Kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di manapun, termasuk Indonesia. Perkembangan garis Kemiskinan Kota Tangerang terhadap Provinsi Banten Tahun 2015-2019 dapat terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2015-2019**



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten

**Tabel 4. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
<b>2015</b>	455.228	102.560	5,04
<b>2016</b>	496.349	102.880	4,94
<b>2017</b>	508.551	105.340	4,95
<b>2018</b>	556.782	103.490	4,76
<b>2019</b>	584.318	98.370	4,43

*Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten*

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berfluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang dan persentase penduduk miskin di interval angka 4 sampai 5 persen.

### **c. Angka Pengangguran**

Pada Tahun 2019, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan di Kota Tangerang sebanyak 79.041 orang, sedangkan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 1.108.057 orang. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar 7,13%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung stagnan dikisaran 7 sampai dengan 8 %.

**Tabel 5. Jumlah Pengangguran (Pencari Kerja) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2018 - Agustus 2019**

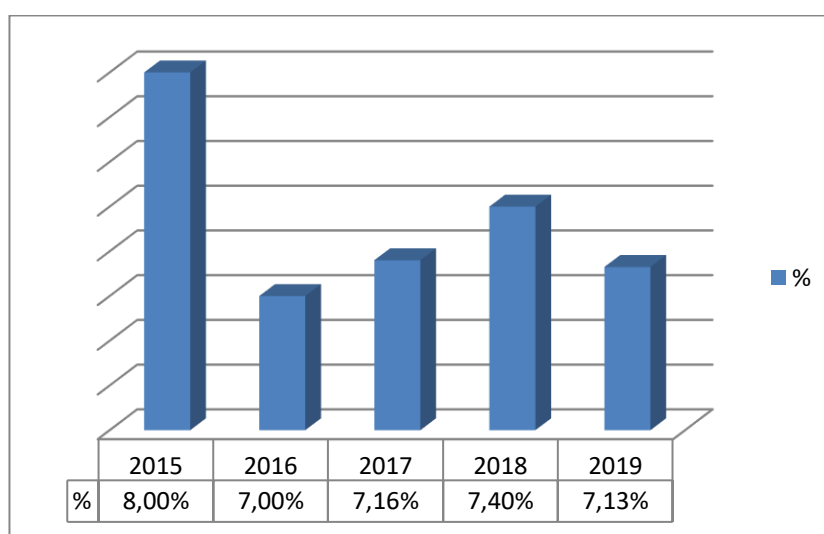
<b>Kab/Kota</b>	<b>Pengangguran (000)</b>		<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	
<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Agustus 2018</b>	<b>Agustus 2019</b>	<b>Agustus 2018</b>	<b>Agustus 2019</b>
Kab. Pandeglang	44	45	8,33	8,71
Kab. Lebak	47	47	7,69	8,05
Kab. Tangerang	164	164	9,70	8,91
Kab. Serang	84	73	12,77	10,65
Kota Tangerang	78	79	7,40	7,13
Kota Cilegon	19	19	9,33	9,68

Kab/Kota	Pengangguran (000)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
Kota Serang	24	25	8,16	8,08
Kota Tangsel	37	39	4,67	4,79
<b>Banten</b>	<b>479</b>	<b>491</b>	<b>8,52</b>	<b>8,11</b>

Sumber: Sakernas Agustus 2018-2019

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Tahun 2015-2019**



Sumber : BPS Kota Tangerang 2019

Realisasi TPT pada Tahun 2019 sebesar 7,13% mengalami penurunan dibanding Tahun 2018 sebesar 7,40% dan menempati posisi kedua setelah Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten dalam hal TPT terendah. Namun tidak tercapainya target TPT Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar 6,84%, dikarenakan berbagai hal diantaranya banyaknya perusahaan yang tutup di Kota Tangerang yaitu sebanyak 32 perusahaan dan angkatan kerja mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.049.823 orang pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 1.108.057 orang pada Tahun 2019 (meningkat sebanyak 58.234 orang) dengan didominasi lulusan SMA sederajat.

#### **d. Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada tahun 2019 mencapai 4,31 persen. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Apabila dilihat

dari laju pertumbuhan menurut lapangan usahanya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan menjadi indikasi penyebab terjadinya perlambatan. Laju pertumbuhan di lapangan usaha tersebut mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 4,07 persen.

Penurunan dari laju pertumbuhan di sub lapangan usaha Angkutan Udara merupakan dampak dari naiknya harga tiket pesawat dan keputusan terkait bagasi berbayar dari maskapai penerbangan *Low Cost Carrier*. Seiring dengan kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar ini secara otomatis mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi penerbangan.

Namun demikian walaupun LPE di Kota Tangerang pada tahun 2019 melambat, secara total masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini didukung oleh lapangan usaha yang mengalami akselerasi atau percepatan pertumbuhan, yaitu Real Estate, Informasi dan Komunikasi serta Konstruksi

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2019**

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2014	5,15	5,51	5,02
2015	5,37	5,45	4,88
2016	5,34	5,28	5,02
2017	5,88	5,73	5,07
2018	5,92	5,81	5,17
2019	4,31	5,54	5,02

Sumber: BPS Kota Tangerang, Propinsi Banten dan Pusat 2019

#### **e. Pendapatan Per Kapita**

PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per-kapita penduduk dengan memperhitungkan angka inflasi. Secara umum pendapatan perkapita Kota Tangerang selama empat tahun terakhir ini, secara konsisten terus mengalami kemajuan. Dimana, PDRB Per Kapita Kota Tangerang meningkat dari 65,04 pada tahun 2016 menjadi 78,585 pada tahun 2019.

Perkembangan PDRB per Kapita Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7. PDRB per Kapita Kota Tangerang  
Tahun 2016-2019**

<b>PDRB Per Kapita (juta Rupiah)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kota Tangerang	65,04	69,826	74,775	78,585

Sumber : BPS Provinsi Banten 2019

**f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

Dalam periode Tahun 2014-2016 terjadi peningkatan angka Gini Ratio secara perlahan di Kota Tangerang. Perkembangan Gini Ratio Kota Tangerang Tahun 2015-2019 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 8. Nilai Indeks Gini Kota Tangerang Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Koefisien Gini</b>	<b>Keterangan</b>
2015	0,38	Ketimpangan Sedang
2016	0,40	Ketimpangan sedang
2017	0,38	Ketimpangan sedang
2018	0,34	Ketimpangan sedang
2019	0.32	Ketimpangan sedang

Sumber: BPS Provinsi Banten 2019

Secara keseluruhan selama Tahun 2015-2019, ketimpangan di Kota Tangerang masih berada dalam batas toleransi (rendah atau sedang).

**2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

**a. Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>IKK</b>	<b>RUMUS/PERHITUNGAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100 \%$	86,79%
2.	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	$\frac{\text{Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah Pendidik PAUD}} \times 100 \%$	56,19%

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
3.	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini}} \times 100 \%$	11,16%
4.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15th ke atas}} \times 100 \%$	100,00%
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100 \%$	98,46%
6.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100 \%$	98,99%
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	0,01%
8.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	0,01%
9.	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah (D IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Sekolah Dasar}}{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar}} \times 100 \%$	87,43%
10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Menengah Pertama}}{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama}} \times 100 \%$	93,73%
11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP}} \times 100 \%$	98,24%
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	100,00%
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	100,00%



NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
		SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	100,00%
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan}} \times 100 \%$	100,00%

Sumber : LPPD Kota Tangerang Tahun 2019

#### b. Kesehatan

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kota}} \times 100 \%$	0,17%
2.	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi minimal tingkat utama}}{\text{Jumlah RS di Kota}} \times 100 \%$	48,39%
3.	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota}}$	0,005
4.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kota}} \times 100 \%$	100,01%
5.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kota}} \times 100 \%$	100,03%
6.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kota}} \times 100 \%$	100,02%
7.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kota}} \times 100 \%$	100%
8.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota}} \times 100 \%$	100,06%
9.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai}} \times 100 \%$	100%

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
	kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota}} \times 100 \%$	
10	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota}} \times 100 \%$	100%
11	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kota}} \times 100 \%$	100%
12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kota}} \times 100 \%$	100%
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kota}} \times 100 \%$	100%
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kota}} \times 100 \%$	100%
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota}} \times 100 \%$	100%
16	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Kelurahan}} \times 100 \%$	100%
17	Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk dan stunting mendapat perawatan disarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk dan stunting yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100 \%$	100%
18	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100 \%$	100%
19	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Melahirkan}}{\text{Jumlah Ibu Melahirkan}} \times 100 \%$	16

Sumber : LPPD Kota Tangerang Tahun 2019

**c. Pekerjaan Umum**

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut}} \times 100 \%$	98,01%
2.	Persentase Panjang Jalan Kota yang di rehabilitasi/ direkonstruksi	$\frac{\text{Panjang jalan Kota yang direhabilitasi/ direkonstruksi}}{\text{Panjang Jalan Kota yang seharusnya direhabilitasi/ direkonstruksi}} \times 100 \%$	91,32%
3.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)}} \times 100 \%$	Tidak terdapat WS yang menjadi kewenangan Kota Tangerang
4.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota (m)}} \times 100 \%$	Tidak terdapat WS yang menjadi kewenangan Kota Tangerang
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kota.}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh Kota tersebut.}} \times 100 \%$	91,65%
6.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kota}} \times 100 \%$	99,70%
7.	Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota}} \times 100 \%$	10,83%
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$	0%

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
9.	Rumah Tangga Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	99,79%
10	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	100%
11	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$	0,24%
12	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	19,94%

Sumber : LPPD Kota Tangerang Tahun 2019

#### d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2019}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2019}} \times 100 \%$	0%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100 \%$	100%
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$	66,45%
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah kumuh}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota}} \times 100 \%$	0,73%
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kota}} \times 100 \%$	34,95%
6.	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}} \times 100 \%$	99,27%

**e. Ketentraman dan Ketertiban**

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$	13,51%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	810 Orang
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	400 Orang
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	7606 Orang
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kota}} \times 100 \%$	73,65%
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit
8.	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	$\frac{\text{Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP}} \times 100 \%$	10,81%

Sumber : LPPD Kota Tangerang Tahun 2019

**f. Sosial**

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar,}} \times 100 \%$	94,26%

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
	panti (Indikator SPM)	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota</p>	22,44%
3.	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	<p>Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng</p>	0,28%
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi</p>	88,51%
5.	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<p>Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina</p>	60,71%

Sumber : LPPD Kota Tangerang Tahun 2019

### 3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

#### a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2018

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Tahun 2018, bahwa kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan nilai tertinggi untuk tingkat Provinsi Banten dengan skor 3,5551 (Sangat Tinggi). Adapun untuk hasil EPPD

Tingkat Nasional sampai dengan saat ini belum ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### **b. Opini Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018**

Pemerintah Kota Tangerang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut yang ke-duabelas kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemerintah Kota Tangerang terus membangun akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah. Penghargaan Opini WTP juga merupakan hasil kinerja aparatur Pemerintah Kota Tangerang yang mampu menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH**

Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

**Tabel 9. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2019</b>	<b>REALISASI 2019 (Unaudited)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.494.321.924.384,00</b>	<b>4.277.659.353.829,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>2.195.868.939.559,00</b>	<b>2.027.112.805.905,00</b>
1.1.1	Pajak daerah	1.877.851.063.854,00	1.760.354.444.860,00
1.1.2	Retribusi daerah	93.268.121.264,00	54.134.890.177,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.229.835.725,00	12.179.498.355,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	210.519.918.716,00	200.443.972.513,00
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.490.037.893.000,00</b>	<b>1.395.236.946.133,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	286.584.862.000,00	223.869.980.497,00
1.2.2	Dana alokasi umum	964.844.367.000,00	964.844.367.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	238.608.664.000,00	206.522.598.636,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>808.415.091.825,00</b>	<b>855.309.601.791,00</b>
1.3.1	Hibah	143.644.120.000,00	144.426.360.000,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari	580.438.261.825,00	626.550.531.791,00



NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (Unaudited)
1	2	3	4
	provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	44.332.710.000,00	44.332.710.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.494.321.924.384,00</b>	<b>4.277.659.353.829,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.039.952.537.109,08</b>	<b>4.371.084.765.016,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.571.939.645.164,57</b>	<b>1.490.076.361.648,00</b>
2.1.1	Belanja pegawai	1.457.242.662.622,57	1.390.365.395.321,00
2.1.2	Belanja bunga	0,00	0,00
2.1.4	Belanja hibah	51.754.193.460,00	38.677.963.960,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.367.949.000,00	2.367.949.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	60.574.840.082,00	58.665.053.367,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.468.012.891.944,51</b>	<b>2.881.008.403.368,00</b>
2.2.1	Belanja pegawai	65.265.215.719,00	61.290.720.882,00
2.2.2	belanja barang dan jasa	2.168.204.160.471,89	1.939.371.523.263,00
2.2.3	belanja modal	1.234.543.515.753,62	880.346.159.223,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.039.952.537.109,08</b>	<b>4.371.084.765.016,00</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>-545.630.612.725,08</b>	<b>-93.425.411.187,00</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>545.630.612.725,08</b>	<b>93.425.411.187,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>560.630.612.725,09</b>	<b>560.634.592.725,09</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	560.630.612.725,09	560.634.592.725,09
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2.3	pembayaran pokok utang	0,00	0,00
6.2.7	Pelunasan Biaya Produksi	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan netto</b>	<b>545.630.612.725,09</b>	<b>545.634.592.725,09</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>452.209.181.538,09</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2020

\*Data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA. 2019 Unaudited



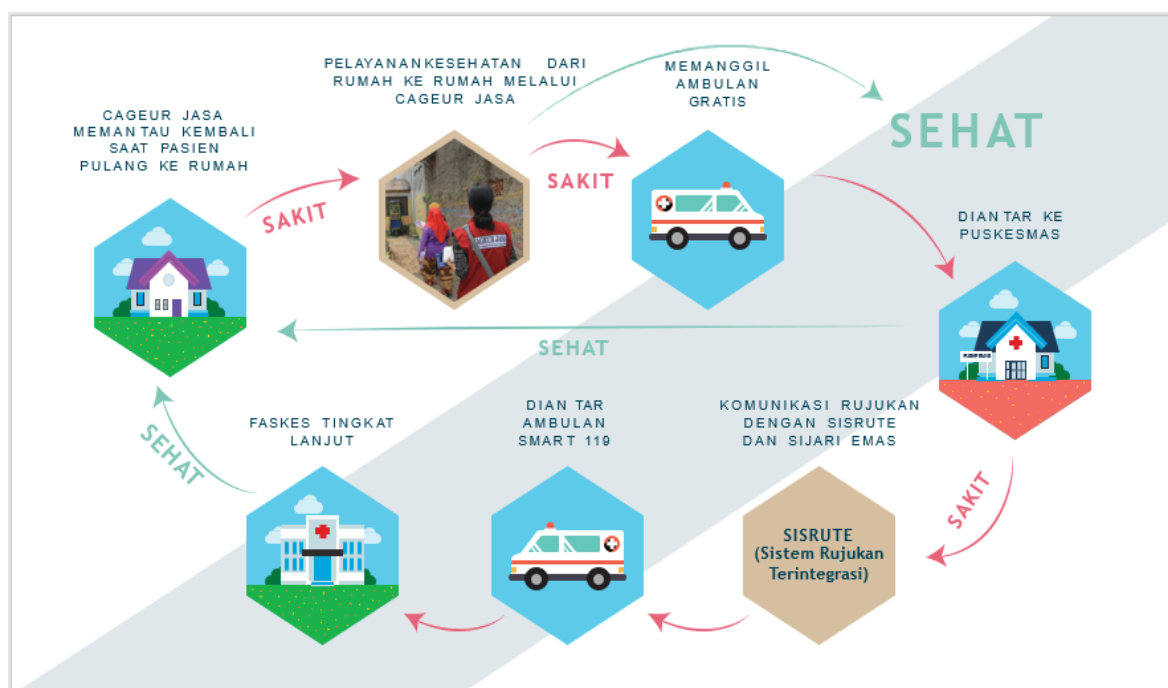
## 5. INOVASI DAERAH

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. CAGEUR JASA (Colaborasi Kunjungan Rumah Integrasi Keluarga Sehat)

Program Cageur Jasa yang menjadi inovasi daerah ini merupakan inisiatif dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Cageur Jasa merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendatangi rumah warga secara langsung. Cageur Jasa selaras dengan program Kementerian Kesehatan yang berusaha untuk membuat pendekatan atau sosialisasi kesehatan kepada keluarga.

**Gambar 1. Alur Pelayanan Cageur Jasa**



Manfaat dari program Cageur Jasa adalah :

1. Kota Tangerang sejak 28 Desember 2018 telah terbebas dari Open Defaction Free (Buang air besar di sembarang tempat)
2. Terlayannya pasien secara langsung tanpa harus datang ke Puskesmas
3. Terpetakannya masalah-masalah kesehatan di seluruh Puskesmas Kota Tangerang
4. Terjalinnnya kerjasama gotong royong antara petugas kesehatan, lintas sektor, dan masyarakat

**b. SAPA SEHAT (Senam 30 Menit, Asupan Sayur dan Buah, Periksa Kesehatan, Agar Sehat dan Bugar)**

Inovasi daerah ini merupakan inisiatif dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Sapa Sehat merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan kesehatan di luar ruang. Kegiatan Sapa Sehat meliputi aktivitas fisik, berupa senam bersama dan penyuluhan kesehatan, yang dilaksanakan setiap hari Jumat serentak di 36 titik oleh Puskesmas dan 104 Kelurahan secara bergantian.



Tujuan Sapa Sehat adalah :

1. Meningkatkan cakupan skrining risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
2. Meningkatkan akses pelayanan promotif, preventif dan kuratif bagi masyarakat
3. Membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Dengan Program Sapa Sehat, permasalahan kesehatan di suatu wilayah dapat diketahui melalui pemeriksaan kesehatan, sehingga edukasi kesehatan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

**c. APLIKASI PERIZINAN ONLINE TERINTEGRASI 123**

Aplikasi Perizinan Online Terintegrasi 123 merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilatarbelakangi oleh tuntutan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik. Aplikasi Perizinan Online Terintegrasi 123 juga sejalan dengan adanya tuntutan Rencana Aksi KPK di tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Didalam aplikasi Perizinan Online Terintegrasi 123, tidak hanya terintegrasi sebanyak 123 pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik, tetapi juga meliputi berbagai inovasi lainnya, yaitu:

- Terintegrasi SIAK (NIK Pemohon)
- Terintegrasi SIKDA (Login Admin OPD)
- Terintegrasi SISMIOP (NOP)
- Terintegrasi KSP (keterangan Status Pajak)
- Terintegrasi SIMPAD (Izin Reklame)
- Terintegrasi BJB (Pembayaran ATM, Alfamart, Tokopedia)

**Gambar 2. Prosedur Perizinan Online Terintegrasi 123**



Manfaat dari penerapan aplikasi Perijinan Online Terintegrasi 123 adalah:

1. Efisien

Efisiensi biaya kertas sebesar 55 juta rupiah dan biaya transport sebesar 431 juta rupiah.

2. Efektif

Menurunkan pelayanan pengaduan dari total jumlah pengaduan sebanyak 826 pengaduan pada tahun 2017 turun menjadi 271 pengaduan di tahun 2018

3. Transparan

Aplikasi dilengkapi dengan fitur Cek Berkas yang dapat dipantau secara transparan

4. Akuntabel

Pelayanan dapat dipantau melalui *smart report*

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jajaran Pemerintah serta masyarakat Kota Tangerang yang telah bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam rangka ikut menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang demi mewujudkan Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing.